

Asal Usul dan Perkembangan Bani Buwaih

Azhar Saleh*

Abstract: This article explains about Buwaihid Dynasty. First, it will explain about the root of the dynasty which came from Dailam ethnic of Syirdil Awandan tribe lived in Jilan mountains, Iran. The founding of this dynasty were 3 brothers, Ali, Hasan, and Ahmad (the sons of Buwaih). Second, it will focus on the political achievements of the Buwaihid Dynasty which are divided into three periods. The first period (945-1012) was the time of power consolidation. The second period (977-1012) was the time of ruling which was started with Adhud al-Daulah's success in conquering Baghdad and continued with the ruling of his descendents. The third period (1012-1055) was the time of the declining of the ruling started in 1012 until 1055 with al-Malik al-Rahim as the last ruler. During Buwaihid Dynasty there was a changing of the ruler from chaliph to amir. One significant changing was the centralization of political and administration control from the chaliph palace (Dar al-Khilafah) to the kingdom palace (Dar al-Mamlakah) which was built by the Buwaih dynasty in Baghdad.

Kata Kunci: Bani Buwaih, khalifah, dan amir.

PERTENGAHAN abad ke-9, pemerintahan dunia Islam di tangan Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran yang sangat berarti. Sejak Khalifah al-

*Jurusan/Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mutawakkil meninggal pada 861 M, pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Baghdad dikuasai para panglima militer berdarah Turki. Mereka itulah yang mengangkat dan memberhentikan khalifah. Posisi khalifah tidak lebih sebagai simbol (boneka). Badri Yatim dalam bukunya *Sejarah Peradaban Islam* mencatat bahwa dari 12 khalifah saat Dinasti Abbasiyah dikuasai panglima militer Turki, hanya empat khalifah di antaranya yang diganti secara wajar karena meninggal. Delapan lainnya diturunkan secara paksa oleh militer, bahkan dibunuh. Hal ini menjadikan wibawa Dinasti Abbasiyah semakin merosot. Satu persatu wilayahnya melepaskan diri dari kendali pusat. Dalam literatur sejarah masa ini disebut masa disintegrasi.¹

Selama masa pemerintahan khalifah al-Radhi (322-329 H/934-940 M), kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya pindah ke tangan panglima militer. Khalifah tidak lebih hanya gelar bagi penguasa Islam.² Ini merupakan tahap pertama dari sebuah proses ketika khalifah "hanya"

menjadi pemimpin spiritual dan panglima militer menjadi pemimpin eksekutif. Jabatan panglima ini secara terus-menerus mengalami pergantian sampai Bani Buwaih datang dan berkuasa. Panglima militer pertama yang paling berkuasa adalah Ibn Ra'iq (324-329 H/938-341 M).

Ibn Ra'iq terbunuh pada 330 H/942 M atas perintah amir Bani Hamdan di Mosul, Hasan ibn Abdullah yang bergelar Nashir al-Daulah yang lalu menjadi panglima militer berikutnya. Nashir al-Daulah kemudian diganti oleh jenderal Tuzun yang berdarah Turki. Ketika Tuzun wafat pada 334 H/945 M, ia diganti oleh Ibn Shirzad. Di masa ini, Ahmad bin Buwaih (Mu'iz al-Daulah) muncul dalam kancah politik tersebut, dengan memangku jabatan sebagai panglima tertinggi.

Ia telah meletakkan dasar untuk menduduki jabatan itu dengan membangun basis kekuasaannya di Ahwaz, Basrah, dan Wasit, dengan mengatur siasat tanpa melakukan persekutuan dengan Bani Baridi dan Bani Hamdan.

Dalam kondisi demikian, khalifah Abbasiyah menjadi tergantung kepada panglima militer. Khalifah diangkat dan diturunkan berdasarkan perintahnya. Perlakuan yang tidak wajar kepada para khalifah Abbasiyah itu tidak serta merta terjadi pada masa kekuasaan Bani Buwaihi. Khalifah al-Muttaqi dibutakan matanya dan diberhentikan sebagai khalifah oleh panglima Tuzun pada 333 H/944 M. Penggantinya, al-Mustakfi, diturunkan dari tahtanya oleh Mu'iz al-Daulah pada 334 H/ 946 M. Ia kemudian digantikan oleh al-Muthi', yang dipaksa turun tahta pada 363 H/974 M hanya karena memberikan dukungan kepada putranya, al-Tha'i yang pada gilirannya juga dipecat oleh Baha' al-Daulah. Al-Qadir yang menjadi khalifah sampai 422 H/ 1031 M, berhasil memulihkan kehormatan jabatan khalifah. Putranya, al-Qa'im, menyaksikan keruntuhan Bani Buwaih di tangan Bani Saljuq.

Masuknya Bani Buwaih ke Baghdad hingga mencapai puncaknya merupakan suatu proses yang panjang. Pada mulanya, mereka mengguna-

kan gelar amir, tetapi sejak Rukn al-Daulah dan putranya, Adhud al-Daulah, pemimpin utama Bani Buwaih juga disebut "raja" (*malik*).

C. E. Bosworth menyebutkan bahwa Bani Buwaih adalah yang paling kuat dan paling luas wilayahnya di antara Bani-Bani (dinasti) yang muncul selama apa yang disebut Vladimir Minorsky sebagai *interlude* Dailam dalam sejarah Iran, yaitu abad ke-10 dan awal abad ke-11 M sebelum datangnya Bani Saljuq.³ Untuk alasan yang tidak jelas, tetapi barangkali bersifat sosial dan keagamaan bukannya politis, tahun-tahun pertama ini menyaksikan permulaan, atau mungkin hanya intensifikasi, suatu migrasi besar-besaran penduduk Dailam dari negerinya. Salah seorang pemimpin militer mereka yang berhasil adalah Mardawij ibn Zayyar yang mendirikan Bani Zayyar.⁴ Berkat tentara-tenteranya itulah Bani Buwaih untuk pertama kalinya memperoleh kamasayhuran.

Asal Usul Bani Buwaih

Bani Buwaih berasal dari negeri Dailam dari kabilah

Syirdil Awandan di dataran tinggi Jilan sebelah selatan Laut Kaspia. Penduduk Dailam postur tubuhnya kuat dan terkenal karena ketahanan fisik mereka yang luar biasa. Mereka dikaruniai semangat kemandirian yang tinggi dan dapat bertahan dengan baik di benteng mereka di pegunungan, tempat latihan yang disebut Elburz. Mereka mengabdikan dalam sistem ketentaraan Dinasti Sasania (Persia) sebagai prajurit bayaran. Bizantium pernah menjumpai mereka dalam keadaan ini, yakni sebagai prajurit bayaran. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menjadi pasukan khusus bagi raja-raja Persia, tetapi hanya mengabdikan sebagai prajurit bayaran, sebagai tentara infanteri yang sangat mahir.

C. E. Bosworth, dalam hal ini, membandingkan peranan mereka dengan bangsa Swiss pada abad pertengahan akhir dan Renaisans di Eropa.⁵ Sebagai masyarakat petani dan peternak sapi, penduduk Dailam tidak memiliki kuda. Meskipun mereka adalah tentara pejalan kaki (infanteri) yang cakap, mereka tetap me-

ngandalkan bangsa Turki sebagai pasukan berkuda (kavaleri), sebuah ketergantungan yang memiliki konsekuensi sosial-politik yang jangkauannya sangat jauh. Wataknya yang keras kepala terhadap kekuasaan pemerintah di bawah pemerintahan Achaemenia dan Sasania, menyebabkan penduduk Dailam yang pemberani juga melakukan perlawanan yang panjang terhadap serangan yang terus menerus dari tentara Arab (Muslim).⁶

Sejak awal abad ke-3 H/ 9 M; para missionaris (*da'i*) sekte Isma'iliyah telah aktif di wilayah ini (Dailam), yang dikirim dari markas besarnya di Rayy.⁷ Pemimpin Dailam seperti Asfar ibn Syiruya (Syirawaih) dan Mardawij dari Jilan bersedia mererima propaganda (dakwah) mereka. Pada periode berikutnya, Hasan al-Sabbah dan asistennya dari sekte Isma'iliyah mendirikan benteng Alamut di tempat latihan Elburz di dekat Jilan, di mana mereka menyusun serangan terhadap Bani Saljuq. Negeri Dailam mengilustrasikan suatu kaidah bahwa, Islam tersebar dengan cepat di daerah padang pasir dan da-

taran tersebut. Sedangkan daerah pegunungan menyediakan kantong-kantong bagi perlawanan dan heterodoksi. Karena itu, afiliasi Syi'ah dengan Bani Buwaih mempunyai kaitan dengan asal usul mereka sebagai penduduk Dailam.

Sejak awal abad ke-10 M, penduduk Dailam telah memulai infiltrasi (penyusupan) ke wilayah Iran bagian barat, sebagai prajurit bayaran dan gerombolan perampok. Para perwira Dailam seperti Laila ibn Nu'man, Makan ibn Kaki, Asfar ibn Syiryua, dan Mardawij ibn Zayyar telah berhasil membangun dinasti-dinasti kecil. Tetapi, kekuatan Dailam ini tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengan ekspansi ke arah barat yang dilakukan Bani Buwaih, penguasa dari Dailam yang paling besar.⁸

Berdirinya Bani Buwaih

Bani Buwaih berhasil meraih kekuasaan politik melalui usaha timbal balik dari tiga bersaudara yang berkuasa berdampingan dengan damai satu sama lain. Kekuasaan Bani Buwaih adalah uru-

san keluarga, yaitu bahwa para sanak dan saudara berkuasa di berbagai propinsi dan distrik dan saling memberi pengakuan atas kekuasaan satu sama lain. Ini merupakan kekuatan sekaligus kelemahan Bani Buwaih. W. Montgomery Watt menyatakan, ketika loyalitas kekeluargaan masih dipegang secara kuat, kekuasaan tiga bersaudara yang terpisah-pisah secara geografis itu bisa disebut sebagai satu negara. Sebaliknya, ketika loyalitas itu mulai merosot dan salah satu saudara siap memerangi saudaranya yang lain, maka masing-masing kekuasaan itu tidak lebih dari negara-negara kecil.⁹

Pendiri Bani Buwaih ini adalah tiga bersaudara yang berasal dari pegunungan Dailam. Tiga bersaudara ini adalah Ali, Hasan, dan Ahmad ibn Buwaih atau Buya. Setelah berkuasa mereka mendapat gelar dari khalifah al-Mustakfi. Ali digelari dengan Imad al-Daulah (Pondasi Negara), Hasan dengan Rukn al-Daulah (Penyangga Negara), dan Ahmad dengan Mu'iz al-Daulah (Penegak Negara). Mereka menyaingi bangsa Turki seba-

gai pemasok tentara bayaran bagi negara Islam (Dinasti Abbasiyah). Tiga bersaudara ini memulai karirnya dengan mengabdikan kepada Bani Saman, kemudian berpindah ke Mardawij dari Bani Zayyar. Ketiga bersaudara ini memperlihatkan bakat kepemimpinan.

Leluhur Bani Buwaih, Abu Syuja Buwaih ibn Fenna Khusraw adalah seorang nelayan miskin atau pengangkut kayu bakar. Sesuai dengan legenda (*tepos*) yang sudah dikenal secara umum, ia menjadi terkenal karena bermimpi melihat kobaran api keluar dari tubuhnya dalam wujud sebatang pohon yang memiliki tiga dahan. Ini ditafsirkan sebagai isyarat mengenai masa depan kekuasaan ketiga anaknya. Cerita tentang mimpi tersebut merupakan alat legitimasi yang khas yang dimaksudkan untuk mendukung kekuasaan Bani Buwaih.¹⁰

Ketika Mardawij wafat pada 943 M, Ali yang tertua dari ketiganya, sudah berkuasa di Isfahan dan sedang berusaha membuat dirinya independen. Akibat adanya kekacauan yang terjadi pada tahun berikutnya, ketiga bersau-

udara itu memperluas kekuasaannya sampai sebagian besar daerah Persia sebelah barat dan barat daya. Ahmad, yang termuda, berkuasa di Khuzistan dan Ahwaz, daerah yang berbatasan dengan sebelah timur Basrah dan Wasit. Dengan demikian ia berada dalam posisi untuk memasuki Baghdad pada tahun 945 M ketika diminta oleh salah satu pihak dalam istana setelah kematian jenderal Tuzun. Saat Ahmad semakin mendekati Baghdad pada bulan Desember 945 M, khalifah bersembunyi, tetapi seorang agen Ahmad, al-Muhallab, membujuknya untuk menemuinya. Ahmad menyatakan kesetiaan kepada khalifah, tetapi bulan Januari 946 M, ia menurunkan al-Mustakfi dari tahta dan menggantinya dengan putra al-Muqtadir yang bergelar tahta al-Muthi' yang sebelumnya merupakan saingan al-Mustakfi. Hal ini terjadi karena intrik istana yang menentangnya terus berlangsung.¹¹

Ali ibn Buwaih yang telah menguasai Isfahan, kemudian menguasai seluruh Fars. Sedangkan Hasan menguasai Jibal. Setelah Ahmad mema-

suki Baghdad maka Dinasti Abbasiyah memulai periode baru di bawah kekuasaan Bani Buwaih yang pemimpinnya biasanya bergelar Amir al-Umara atau panglima tertinggi yang menjadi pemegang kekuasaan negara.

Setelah Ahmad meninggal, ia digantikan putranya, Adhud al-Daulah. Ia berhasil mempersatukan seluruh kekuasaan Bani Buwaih di Irak, Persia selatan, dan Oman. Di masanya kekuasaan Bani Buwaih mencapai puncak kejayaannya. Pada masa Adhud al-Daulah pula suatu konsepsi patrimonial tentang kekuasaan yang tidak diragukan berasal dari masa lalu penduduk Dailam dibangkitkan kembali oleh Bani Buwaih. Akibatnya, terjadi fragmentasi politis di masa kemudian. Ketika seorang penguasa kuat seperti Adhud al-Daulah menjadi kepala/pemimpin tertinggi Bani ini, rasa solidaritas dapat dijumpai hampir di mana-mana. Namun setelah ia meninggal, dalam internal Bani Buwaih terjadi gejolak sosial. Gejolak ini pada mulanya memudahkan Mahmud Ghaznah merebut Rayy dan Jibal dari

Bani Buwaih pada 420 H/1029 M, dan kemudian melemahkan mereka dalam menghadapi gerakan ke barat yang dilakukan Tughril Bek ibn Saljuq, yang mengklaim bahwa ia sedang berupaya membebaskan Irak dan Persia barat dari kaum pembuat bid'ah. Akhirnya Baghdad dapat diduduki oleh Bani Saljuq pimpinan Tughril Bek pada tahun 447 H/1055 M.¹²

Munculnya Bani Buwaih menjadi pemegang kekuasaan di Irak dan Iran Barat didahului oleh suatu periode perpecahan dalam internal Dinasti Abbasiyah akibat dari lepasnya kendali kekuasaan khalifah dan meluasnya perselisihan masyarakat di Baghdad.¹³ Sebelum Bani Buwaih memasuki Baghdad, Dinasti Abbasiyah telah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan (bani) kecil (masa disintegrasi). Irak berada di bawah kontrol efektif Amir al-Umara (panglima) Ibn Ra'iq, seperti disebutkan di atas, di mana khalifah Abbasiyah kehilangan kekuasaan eksekutifnya.¹⁴

Di awal kemunculannya, Bani Buwaih menguasai seluruh Rayy, Isfahan, dan Ji-

bal. Kirman berada di bawah kekuasaan Muhammad bin Ilyas. Bani Hamdan menguasai Mosul dan Diyar-diyar (Diyar Rabi'a, Diyar Bakr, dan Diyar Mudhar). Mesir dan Syria berada di bawah kekuasaan Bani Fatimiyah. Bani Saman menguasai Khurasan dan Transoxania. Sementara Ahwaz, Wasith, dan Basrah di bawah kendali Bani Baridi. Golongan Qaramithah menduduki Yamamah dan Bahrain. Tabaristan dan Jurjan berada di bawah kekuasaan penguasa Dailam. Meskipun terjadi perpecahan, gagasan tentang *mamlakah al-Islam* (kerajaan Islam) tetap berlaku.¹⁵ Khalifah Dinasti Abbasiyah yang mengalami kemandulan politik, tetap menjadi simbol kesatuan negara, sedangkan otoritas kekuasaannya dipegang oleh penguasa-penguasa lokal. Al-Mas'udi mengeluhkan kelemahan Islam, kekuasaan Bizantium, penurunan jemaah haji, dan tidak adanya perang suci (jihad), sementara Islam pada masa-masa sebelumnya mengalami kejayaan.¹⁶

Tiga bersaudara yang mendirikan Bani Buwaih ada-

lah perwira yang dengan senang hati berpindah-pindah memberikan kesetiaan dari satu majikan ke majikan yang lain. Setelah Makan ibn Kaki ditaklukkan oleh Mardawij, umpamanya, mereka beralih ke pihak yang menang.

Bani Buwaih dan saingan mereka di timur, Bani Saman, penguasa Khurasan dan Transoxania, menciptakan apa yang disebut dengan *The Iranian intermezzo* (selingan bangsa Iran) dalam sejarah Islam di antara kekuasaan bangsa Arab (Dinasti Abbasiyah), yang bertahan sampai abad ke-10 M, dan didominasi bangsa Turki, yang dimulai pada abad ke-11 M. Bani Zayyar, yang dahulu merupakan pelindung Bani Buwaih, juga pernah melakukan upaya guna membangkitkan kembali tradisi Iran. Orientasi keiranian dari Bani Buwaih sangat jelas, terutama dalam bidang politik. Sementara Bani Saman membangkitkan gairah kesusastraan Persia dan sebagai yang bertanggung jawab atas kebangkitan kembali (renaissance) kebudayaan Iran. Bani Buwaih memimpin kelahiran kembali ideologi politik Iran.¹⁷

Solidaritas tiga bersaudara pendiri Bani Buwaih, sebagainya, berakar pada kebiasaan mendahulukan yang lebih tinggi dan menghormati yang lebih tua. Pada tahun 363 H/ 973 M, Muiz al-Daulah bertemu dengan saudaranya Imad al-Daulah di Arrajan, ia mencium tanah lebih dahulu sebelum menciumnya dan menolak untuk duduk jika ia datang. Pada saat Imad al-Daulah wafat dan kepemimpinan diserahkan kepada Rukn al-Daulah, Mu'iz al-Daulah menyembah kepadanya dan mengirim tentara sebagai dukungan terhadapnya. Mu'iz al-Daulah meninggalkan surat wasiat untuk putranya, Bakhtiyar yang bergelar Izz al-Daulah, yang memerintahkan kepadanya supaya mentaati pamannya, Rukn al-Daulah dan saudara sepupunya, Adhud al-Daulah ibn Rukn al-Daulah, orang yang lebih tua darinya. Rukn al-Daulah segera bertindak dengan keras ketika putranya Adhud al-Daulah berupaya menggantikan saudara sepupunya, Bakhtiyar, sebagai penguasa Baghdad.

Masa kekuasaan Bani Buwaih berlangsung selama

satu abad lebih. Masa ini dapat dibagi dalam tiga periode: 1. Periode 945-977 M, 2. Periode imperium 977-1012 M, dan 3. Kemunduran dan keruntuhan 1012-1055 M.¹⁸

Periode pertama meliputi konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh tiga putra Buwaih dan diteruskan oleh anak-anak mereka, Bakhtiyar ibn Mu'iz al-Daulah dan Adhud al-Daulah ibn Rukn al-Daulah. Karena Imad al-Daulah (Ali) tidak mempunyai anak, kekuasaannya di Fars digantikan oleh keponakanannya, Adhud al-Daulah.

Periode kedua, yaitu periode imperium (kemaharajaan) dimulai dengan berhasilnya Adhud al-Daulah menguasai Baghdad dari tangan Bakhtiyar dan terus berlangsung selama masa pemerintahan anak-anaknya, Shamsam al-Daulah (983-987), Syaraf al-Daulah (987-989), dan Baha' al-Daulah (989-1012).

Setelah pindah ke Baghdad, Adhud al-Daulah menguasai Syiraz (ibukota propinsi Fars) sebagai pusat koordinasi, di mana ia menemukan seorang menteri dan

kepala pengadilan. Adiknya, Mu'ayyid al-Daulah, menggantikan ayahnya (Rukn al-Daulah) di Jibal (Rayy dan Isfahan). Kemudian, ia diganti oleh saudaranya yang lain, Fakhr al-Daulah. Tidak diragukan lagi bahwa, Adhud al-Daulah adalah "raja" Bani Buwaih yang paling terkemuka, yang pada masa pemerintahannya, kerajaan mencapai kekuasaannya yang paling besar dan luas. Meskipun kesatuan yang telah dibangunnya menjadi terpecah-pecah setelah kematiannya, dan percekocokan di antara putra-putranya merupakan gejala kemunduran yang baru dimulai.

Ketiga adalah periode kemunduran dan kehancuran yang dimulai pada 1012 dan berakhir pada 1055 M. Masa 43 tahun terakhir kekuasaan Bani Buwaih diperintah oleh tiga putra Baha' al-Daulah dan putra serta cucu dari putra pertama. Banyak tenaga dihabiskan untuk saling bertempur sesama anggota keluarga.

Sultan al-Daulah, yang memerintah Irak dari 1012, terlibat peperangan dengan saudaranya, Musyrif al-Dau-

lah dan para pangeran lainnya di daerah Diyar Bakr sekitar 1019. Ia kalah pada 1020 sehingga bersedia untuk mengundurkan diri ke propinsi Khuzistan dan Fars. Sementara Musyrif al-Daulah memerintah Irak sampai wafatnya pada 1025. Karena gelar-gelar kehormatan sudah menjadi biasa, maka Musyrif al-Daulah mencoba melebihinya dengan menyebut dirinya Shahanshah, "Raja Diraja", sebuah gelar Persia kuno.

Putra ketiga, Jalal al-Daulah, dinobatkan sebagai Amir al-Umara pada 1025. Mula-mula tidak cukup kuat untuk bergerak dari istananya di Basrah dan menegakkan kekuasaan di Baghdad. Bahkan sebagian besar dari waktu 12 tahun dihabiskan untuk peperangan antara dia dengan kemenakannya, Abu Kalijar (Imaduddin al-Mirzaban) ibn Sultan al-Daulah yang menggantikan ayahnya di Khuzistan dan Fars setelah ditinggal mati pada Desember 1024. Mereka bergantian menjabat sebagai Amir al-Umara, tetapi tidak satu pun yang berhasil menjalankan kekuasaan dengan efektif. Tentara

Turki, terutama yang di Baghdad, terus menimbulkan persoalan karena menuntut lebih banyak uang imbalan. Akhirnya, pada 1037 keduanya menyepakati perdamaian dan dikuatkan dengan perkawinan putri Jalal al-Daulah dengan putra Abu Kalijar.

Ketika Jalal al-Daulah wafat pada 1044, Abu Kalijar mewarisi sisa-sisa kekuasaan Bani Buwaih. Ancaman baru, dari Bani Saljuq yang berdarah Turki telah meningkat dengan cepat yang bergerak dari timur sejak 1030. Abu Kalijar mencoba menghadapinya dengan mengadakan persekutuan dengan Tughril Bek ibn Saljuq, yang diperkuat dengan dua perkawinan, tetapi ini hanya memberikan masa istirahat sebentar. Ketika Abu Kalijar wafat pada 1048 dan digantikan oleh anak tertuanya yang bergelar al-Malik al-Rahim, Bani Saljuq mulai bergerak lagi. Kekacauan terjadi di Irak. Tentara Turki sering tidak bisa dikendalikan, terjadi pertempuran antara kaum Sunni melawan kaum Syi'ah, dan berbagai kelompok lokal di seluruh negeri mencoba untuk mencari keuntungan

bagi diri sendiri. Persekutuan-persekutuan selalu berubah-ubah, sementara para politisi yang berwawasan jauh mencoba menjalin hubungan dengan Bani Saljuq. Seseorang yang tampaknya bisa dianggap kompeten adalah pemimpin tentara Turki, jenderal al-Basasiri, yang sangat berjasa kepada Jalal al-Daulah dan kemudian al-Malik al-Rahim, tetapi menjelang tahun 1054 atau 1055 ia mulai memainkan perannya untuk dirinya sendiri.

Sistem Pemerintahan Bani Buwaih

Hubungan Bani Buwaih dengan khalifah Dinasti Abbasiyah merupakan persoalan yang kompleks. Meskipun Bani Buwaih bermazhab Syi'ah, tetapi mereka tidak berusaha menghapuskan kekhilafahan Abbasiyah. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan praktis. Penduduk Baghdad dan Irak umumnya menganut mazhab Ahlus Sunnah, demikian pula tentara Turki, pasukan kavaleri yang sangat diandalkan untuk menambah kekuatan pasukan infanteri Dai-lam (Bani Buwaih). Bani Bu-

waih harus memelihara keseimbangan yang pelik antara sentimen Syi'ah dan tekanan Sunni. Prinsip *cuius regio eius religio* –dalam bahasa Arab: *al-nās 'alā dīn mulūkihim* (rakyat mengikuti agama raja mereka)- tidak diberlakukan di sini.¹⁹

Penghormatan terhadap otoritas khalifah yang tersebar luas di Irak, dan di dunia Islam secara umum, dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan Bani Buwaih. Mereka mendapatkan otoritas formal dari khalifah untuk memerintah. Dalam memegang kendali kekuasaan, mereka memerlukan pancaran dari khalifah Sunni untuk mencegah apapun yang dengan mudah dapat menggugurkan legitimasi yang mereka nikmati. Mereka menempatkan diri mereka sebagai pelindung khalifah, yang semata-mata menjadi boneka di bawah kekuasaan mereka.

Penguasa Bani Buwaih mempunyai alasan lain mengapa mereka tidak menghapuskan khalifah Abbasiyah, yaitu guna mendapatkan dukungan dari golongan Syi'ah (Ali) yang sah. Penghapusan

semacam ini akan membatasi kekuasaan Bani Buwaih sendiri karena mereka diharuskan tunduk kepada atau mentaati khalifah golongan Syi'ah. Mu'iz al-Daulah dikatakan telah menghapus gagasan tentang pengangkatan khalifah dari golongan Syi'ah Zaidiyah juga karena alasan ini.²⁰ Amir-amir Bani Buwaih, Mu'iz al-Daulah, Rukn al-Daulah, dan Adhud al-Daulah bahkan menindak dengan tegas para penuntut dari golongan Syi'ah. Konsepsinya yang umum adalah gagasan tentang “suatu bentuk kekuasaan bersama Abbasiyah-Syi'ah”.²¹

Penguasa Bani Buwaih memerintahkan namanya dicetak pada mata uang dan disebutkan pada khutbah Jum'at setelah disebutkannya nama khalifah. Di sini dapat dikatakan bahwa khalifah memegang otoritas spiritual tanpa kekuasaan temporal yang riil. Kedudukan khalifah telah digeser oleh menteri; pengaruhnya terbatas pada pembuatan kebijakan-kebijakan keagamaan berkenaan dengan golongan Sunni di Baghdad dan pengawasan terhadap beberapa urusannya sendiri (ter-

batas). Ketika khalifah al-Tha'i' berusaha mencampuri urusan kenegaraan dengan mendukung Bakhtiyar daripada Adhud al-Daulah, ia gagal secara tidak hormat. Adalah bukan suatu yang kebetulan jika kekhilafahan jatuh pada titik serendah ini selama masa kekuasaan Adhud al-Daulah. Bahkan Zaenal Abidin Ahmad menerangkan bahwa seluruh hak kekuasaan khalifah sudah dicabut, mereka hanya dapat tinggal di dalam istana negara. Mereka bagaikan orang tawanan di dalam istana, tidak pernah bertemu dengan para pembesar, apalagi dengan rakyat banyak. Hak mereka yang tersisa hanya sekadar dibacakan namanya di dalam setiap khutbah Jum'at, itupun harus dibarengi dengan nama penguasa Bani Buwaih.²²

Semua khalifah Abbasiyah pada masa Bani Buwaih diangkat oleh mereka dengan menggunakan nama "pilihan rakyat" (*election*). Kemudian sesudah upacara pelantikan, khalifah disuruh tinggal di istana dan dilarang berhubungan dengan siapapun. Di depan istana ditempatkan para pengawal loyalis Bani Buwaih

yang sekaligus menjadi mata-mata untuk menjaga khalifah. Bahkan merekalah umumnya yang dijadikan sebagai pembunuh atau sekurangnya mengancam jika khalifah masih berusaha mengadakan hubungan dengan pihak luar.²³

Wujud nyata pergeseran kekuasaan dari khalifah kepada amir Bani Buwaih adalah pemusatan kontrol politik dan administrasi dalam istana negara (*Dār al-Mamlakah*) yang baru didirikan di Baghdad dan pemindahannya dari istana khalifah (*Dār al-Khilāfah*). Berdasarkan hukum agama (syari'ah), khalifah berkeajiban memimpin perang (jihad) dan membela umat Islam. Bani Buwaih tidak mencoba menanggalkan hak prerogatif khalifah tersebut, tetapi ia tidak lagi memiliki sarana dan sumber dana guna melakukan hal tersebut. Keadaan yang buruk dari khalifah terlihat jelas selama masa krisis tahun 972, ketika Bizantium menginvasi Mesopotamia Utara, yang mengancam Baghdad. Ketika Bakhtiyar meminta kepada khalifah supaya ia memberikan bantuannya guna melakukan jihad (perang),

ia menanggapi bahwa kewajiban tersebut menjadi tanggung jawabnya hanya jika pengaturan segala urusan di dunia ini berada di dalam genggamannya; dalam keadaan seperti sekarang, ia hanya memiliki bahan yang sangat sedikit, yang hampir tidak cukup untuk kebutuhannya sendiri, sementara dunia berada di dalam kekuasaan Bakhtiyar dan penguasa-penguasa propinsi. Karena itu, ia berpendapat bahwa, perang (jihad), pelaksanaan haji, dan persoalan-persoalan lain yang dulu berada di bawah wewenang khalifah, sekarang tidak lagi menjadi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Satu-satunya hak istimewa yang masih dimilikinya adalah disebutkan namanya dalam khutbah Jum'at, seperti disebutkan di atas. Dalam keadaan demikian, khalifah berpendapat bahwa persoalan-persoalan amir harus diselesaikan, dan jika ia juga menghendaki pencabutan hak prerogratifnya, sang khalifah akan mencabutnya terlebih dahulu dan menyerahkan segala urusan (*amr*, maksudnya kekuasaan) kepada amir.²⁴

Selama kekuasaan berada di tangan Bani Buwaih, keadaan politik mengalami kekacauan yang sangat hebat. Di antara 10 orang penguasa yang tampil, ada beberapa yang berniat untuk memperbaiki situasi politik yang sangat buruk itu, tetapi segala usaha yang baik itu bagaikan mengukir di atas air.

Kekacauan politik masa Bani Buwaih dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah Mu'iz al-Daulah merupakan permulaan yang buruk bagi seluruh masa yang hampir satu seperempat abad itu. Sikap permusuhan yang dilakukannya kepada para khalifah Abbasiyah, disebabkan oleh pertentangan politik Syi'ah yang dianutnya dengan paham politik Ahlus Sunnah yang dianut oleh para khalifah dan seluruh rakyat. Bani Buwaih pada masa ini merupakan pemegang kekuasaan mutlak di Irak. Mereka tidak pernah berhenti menyiksa para khalifah dan merenggut hak-hak mereka.²⁵

Ketika Mu'iz al-Daulah memasuki ibukota Baghdad, ia telah berencana menghapuskan khilafah dan meng-

angkat kalangan Syi'ah sebagai penggantinya. Tetapi rencana tersebut tidak jadi dilakukannya, setelah ia melihat bahaya besar yang dihadapinya karena pergantian prinsip politik itu. Dengan bersabar hati, pasti ia dita'ati oleh seluruh tentara, diakui oleh suku bangsanya, Dailam, dan merupakan alat untuk memperalat khalifah di tangannya.²⁶

Ibn al-Atsir meriwayatkan, bahwa Mu'iz al-Daulah telah menghina khalifah al-Mustakfi dan ia (Mu'iz al-Daulah) melancarkan politik licik serta terus melakukan tindakan kejamnya. Khalifah diperintahkan menghadap kepadanya dengan berjalan kaki, kemudian dipenjarakan dan akhirnya dicungkil matanya. Selanjutnya, ia dicopot dari jabatannya sebagai khalifah, lalu dilantiknya khalifah yang baru bernama al-Muthi' yang dapat dijadikannya mainan di tangannya.

Mengenai buruknya suasana politik yang terjadi selama masa pemerintahan Bani Buwaih, Hasan Ibrahim Hasan menyimpulkan tindakan mereka bahwa, politik Bani Buwaih meninggalkan kesan

yang sangat buruk di Irak. Di mana-mana timbul gerakan separatis, tentara mengadakan pemberontakan, sehingga kekacauan dan kegoncangan masyarakat umum terjadi dan warga masyarakat merasa kosong hatinya. Sifat fanatik Bani Buwaih kepada politik Syi'ah telah memaksa penduduk bermazhab Ahlus Sunnah supaya mengikuti segala upacara kaum Syi'ah.²⁷

Kekuasaan Bani Buwaih mencapai puncaknya pada masa Adhud al-Daulah. Khalifah al-Thai' memerintahkan supaya namanya dibacakan di setiap khutbah Jum'at setelah nama khalifah dengan panggilan Malik (raja), dimulai dari Jum'at terakhir bulan Sya'ban 368 H.²⁸ Ibn Khallikan berkata: bahwa Adhud al-Daulah adalah yang pertama mendapatkan gelar "Malik" (raja) dalam Islam. Namanya disebutkan di atas mimbar khutbah setiap Jum'at dengan gelaran Syahansyah A'zham, atau Raja Diraja. Belum ada seorang pun penguasa Bani Buwaih yang memegang kekuasaan begitu besar di atas wilayah yang luas, sehingga tertunduk kepadanya seluruh

penguasa Bani Buwaih yang lainnya di berbagai daerah. Seluruh negeri dan rakyat taat dan setia, demikian pula dengan seluruh jajaran pimpinan tentara, mereka menyatakan kesetiaan mereka kepadanya.²⁹

Berkenaan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan selama masa pemerintahan Bani Buwaih, pada masa ini terlihat dengan jelas adanya pembagian kekuasaan di antara amir (raja) dan khalifah. Namun, pembagian ini tidak mengandung pengertian adanya pemisahan yang tajam antara bidang-bidang sekular (keduniaan) dan keagamaan. Amir menjalankan pemerintahan dengan kebijakan dari kekuasaan ilahiyah dan dengan otoritas dari khalifah. Khalifah tidak sepenuhnya dibebaskan dari bidang-bidang yang sekuler. Hubungan antara amir dan khalifah, sebagaimana yang berkembang pada masa Bani Buwaih, serupa dengan pengaturan dalam kerajaan Bizantium, di mana raja dipandang sebagai representasi Tuhan yang menikmati hubungan istimewa dengan Gereja, dan dinobatkan (mu-

lai pertengahan abad kelima) oleh Uskup Agung di Konstantinopel (*Patriarch of Constantinople*). Para filosof pada periode ini menekankan pemerintahan sekular yang berasal dari Tuhan, yang terdapat dalam semangat teori-teori tentang kerajaan dari Bizantium, Hellenis (Neopitagorian dan Neoplatonik), dan Iran. Namun demikian, pembagian kekuasaan memang ada. Aforisme Persia kuno mengatakan: "agama dan pemerintahan adalah kembar", sering disebutkan pada periode ini, diwujudkan dalam realitas.

Pembagian kekuasaan ini membuka jalan bagi pengaturan (ini diteruskan kemudian oleh Bani Saljuq) dengan jalan mana amir (raja, sultan) menjadi penguasa yang efektif, sedangkan khalifah merupakan pemimpin boneka yang bersifat simbolik.³⁰

Masih tentang sistem pemerintahan, perlu disebutkan bahwa menteri (wazir) yang pada masa ini merupakan "wakil amir" bukan seperti menteri pada jaman sekarang, juga memainkan peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu,

beberapa menteri penting disebutkan di sini. Menteri-menteri Bani Buwaih yang utama adalah Abu al-Fadl ibn al-Amid, menteri dari Rukn al-Daulah dan guru bagi Adhud al-Daulah di Fars; puteranya, Abu al-Fath ibn al-Amid, menteri dari Rukn Al-Daulah, dan untuk waktu yang singkat, menteri dari Mu'ayyid al-Daulah. Shahib Isma'il ibn Abbad, menteri dari Mu'ayyid al-Daulah dan Fakhr al-Daulah. Abu Abdullah ibn Sa'dan, yang mengabdikan kepada anak Adhud al-Daulah, Shamsham al-Daulah. Berkaitan dengan sejarah kultural dari periode pertama, Abu Muhammad al-Muhallab, menteri dari Mu'ayyid al-Daulah, adalah tokoh yang patut diperhatikan. Anak Mu'iz al-Daulah, Bakhtiyar, seorang amir yang bimbang dan kurang kuat pendiriannya, mempunyai beberapa orang menteri, dan tidak ada seorang pun yang berhasil. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Abu al-Fadl al-Syirazi dan Muhammad ibn Baqiyyah. Tetapi Adhud al-Daulah, sebagai amir Bani Buwaih yang terbesar hanya mempunyai menteri-menteri

yang paling kurang penting keberadaannya.³¹

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Bani Buwaih berasal dari negeri Dailam dari kabilah Syirdil Awandan, di dataran tinggi Jilan sebelah barat laut Laut Kaspia. Dailam didiami orang-orang yang kuat fisiknya dan dikaruniai semangat kemandirian yang tinggi. Mereka adalah tentara pejalan kaki yang cakap.

Bani Buwaih meraih kekuasaan politik melalui usaha timbal balik dari tiga bersaudara. Mereka adalah Ali, Hasan, dan Ahmad ibn Buwaih atau Buya. Setelah berkuasa mereka diberi gelar oleh khalifah al-Mustakfi dengan: Imad al-Daulah (Pondasi Negara), Rukn al-Daulah (Penyangga Negara) dan Mu'iz al-Daulah (Penegak Negara). Kekuasaan Bani Buwaih berlangsung selama satu abad lebih, 945-1055 M yang dibagi dalam tiga periode: *Pertama* (945-977) sebagai masa konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh tiga putra Buwaih dan diteruskan oleh anak-anak mereka,

Bakhtiyar ibn Mu'iz al-Daulah dan Adhud al-Daulah ibn Rukn al-Daulah. *Kedua* (977-1012), yaitu periode kerajaan dimulai dengan keberhasilan Adhud al-Daulah berkuasa di Baghdad, dan terus berlangsung selama masa pemerintahan anak-anaknya, Shamsam al-Daulah (983-987), Syaraf al-Daulah (987-989), dan Baha' al-Daulah (989-1012). *Ketiga* (1012-1055) periode kemunduran dan kehancuran yang dimulai pada tahun 1012 dan berakhir pada 1055, dengan amir terakhirnya al-Malik al-Rahim.

Hubungan khalifah Abasiyah dengan amir Bani Buwaih selama periode ini dapat dilihat dengan jelas dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang dijalankan selama periode ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan di antara amir (panglima) dan khalifah. Amir menjalankan pemerintahan dengan kebijakan dari kekuasaan Ilahiyah dan dengan otoritas dari khalifah; khalifah tidak sepenuhnya dibebaskan dari bidang-bidang yang sekuler. Hubungan antara amir dan khalifah pada masa Bani

Buwaih mengindikasikan pandangan yang menganggap bahwa khalifah/raja merupakan representasi Tuhan di bumi. Aforisme Persia kuno mengatakan, agama dan pemerintahan adalah kembar yang diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pembagian kekuasaan ini membuka jalan bagi pengaturan yang diteruskan oleh Bani Saljuq dengan jalan amir (raja, sultan) menjadi penguasa yang sesungguhnya. Sedangkan khalifah hanyalah pemimpin boneka yang bersifat simbolik.

Dalam menjalankan pemerintahannya, amir dibantu oleh menteri (wazir). Menteri pada masa ini merupakan "wakil amir" yang membantu urusan kenegaraan atau dapat pula disejajarkan dengan sekretaris negara atau mungkin wakil presiden pada jaman sekarang. Oleh karena itu, setiap amir yang berkuasa dibantu oleh satu orang menteri. Dengan demikian, struktur negara menjadi khalifah sebagai "pemimpin spiritual", amir sebagai "pemimpin aktual" dan menteri sebagai "wakil amir".

Catatan Akhir

1. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, h. 61-67 dan Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, h. 137-146.
2. Tentang arti penting pergantian kekuasaan dari khalifah kepada amir, lihat Joel L. Kraemer, *Humanism in The Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age*, Leiden, E. J. Brill, 1986, h. 39.
3. C. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, Bandung, Mizan, 1992, h. 122-123.
4. *Ibid*, h. 122.
5. C. E. Bosworth, "Military Organisation under the Buyids of Persia and Iraq," *Orients*, 18-19, 1967, h. 147, Edisi cetakan ulang dalam *The Medieval History of Iran, Afghanistan and Central Asia*, London, Jilid III, 1977, dalam Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 32.
6. Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 33.
7. C. E. Bosworth, "Military... *op. cit.*, h. 143,
8. S. M. Stern, "The Early Isma'ili Missionaries in North-West Persia and in Khurasan and Transoxania," *BSOAS*, 23, 1960, 59-60, dalam Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 34.
9. W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992, h. 202.
10. H. Busse, "The Revival of Persian Kingship under the Buyids," dalam D.S. Richard (ed.), *Islamic Civilization 950-1150*, h. 58. Lihat Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 33-34.
11. W. Montgomery Watt, *op. cit.*, h. 201-202.
12. C. E. Bosworth, *op. cit.*, h. 123.
13. Tentang Bani Buwaih secara umum, lihat W. Montgomery Watt, *op. cit.*, h. 201-240.
14. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta, Kota Kembang, 1989, h. 205.
15. *Mamlakah al-Islam* yang dimaksud di sini adalah -kesatuan yang mencakup negara (Islam) yang terbentang dari India sampai Atlantik, di mana kaum Muslimin dapat melakukan perjalanan di sepanjang wilayah ini di bawah satu bendera agama, hukum, budaya dan "kewarganegaraan." Lihat Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 31.
16. Tentang terpecahnya *mamlakah al-Islam* (negara Islam) dalam dinasti-dinasti yang kecil, lihat al-Mas'udi, *Murūj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jauhar*, Cairo, al-Sa'adah, Jilid I, 1958, Cet. Ke-3, h. 73.
17. Joel L. Kraemer meminjam istilah ini dari Vladimir Minorksy. Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 36.
18. Periodisasi ini mengikuti Joel L. Kraemer, *Ibid*, h. 37.
19. Goitein, "Changes in the Middle East (950-1150)," dalam *Islamic Civilization 950-1150*, h. 18 dalam Joel L. Kraemer, *Ibid*, h. 38.
20. *Ibid*, h. 38.
21. *Ibid*
22. Zaenal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam dan Ummatnya*, Jakarta, Bulan Bintang, Jilid IV, 1978, h. 30.
23. *Ibid*, h. 30.

24. Ibn Miskawaih, *Tajārib al-Umam*, Cairo, Mathba'ah Tamaddun, Jilid II, 1914, h. 307-308.
25. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, London, Macmillan, 1970, h. 471. Zaenal Abidin Ahmad, *op. cit.*, h. 25.
26. *Ibid.*, h. 25-26.
27. Hasan Ibrahim Hasan, *Tārikh al-Islām al-Siyāsī wa al-Dīnī wa al-Ṣaqafī wa al-Ijtimā'ī*, Cairo, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, t.t.), Jilid III, h. 63.
28. Zaenal Abidin Ahmad, *op. cit.*, h. 27.
29. Ibn Khallikan, *Wafayāt al-A'yān*, Cairo, t.p., Jilid I, 1310/1893, h. 416, dan *Ibid.*
30. Joel L. Kraemer, *op. cit.*, h. 38-39, mengutip dari J. M. Hussey, *The Byzantine World*, New York, 1961, h. 88.
31. *Ibid.*, h. 37.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Zaenal Abidin, *Sejarah Islam dan Ummatnya*, Jakarta, Bulan Bintang, Jilid IV, 1978.
- al-Mas'udi, *Murūj al-Dzahab wa Ma'ādin al-Jauhar*, Cairo, al-Sa'adah, 1958, Juz I, Cet. Ke-3.
- Bosworth, C. E., "Military Organization under the Buyids of Persia and Iraq," *Orients*, 18-19, 1967, Edisi cetakan ulang dalam *The Medieval History of Iran, Afganistan and Central Asia*, London, 1977, Jilid III.
- , C. E., *Dinasti-Dinasti Islam*, Bandung, Mizan, 1992.
- Busse, H., "The Revival of Persian Kingship under the Buyids," dalam D. S. Richard (ed.), *Islamic Civilization 950-1150*. Goitein, "Changes in the Middle East (950-1150)," dalam *Islamic Civilisation 950-1150*.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta, Kota Kembang, 1989.
- , Hasan Ibrahim, *Tārikh al-Islām al-Siyāsī wa al-Dīnī wa al-Ṣaqafī wa al-Ijtimā'ī*, Cairo, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, t.t.), Jilid III.
- Hussey, J. M., *The Byzantine World*, New York, 1961.
- Ibn Khallikan, *Wafayāt al-A'yān*, Cairo, t.p., Jilid I, 1310/1893.
- Ibn Miskawaih, *Tajārib al-Umam*, Cairo, Mathba'ah Tamaddun, Jilid II, 1914.
- Kraemer, Joel L., *Humanism in The Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age*, Leiden, E. J. Brill, 1986.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, London, Macmillan, 1970.
- Stern, S. M., "The Early Isma'ili Missionaries in North-West Persia and in Khurasan and Transoxania," *BSOAS*, 23, 1960.
- Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam*, Yogyakarta, Graha Widia, 1992.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.